



LAPORAN KINERJA

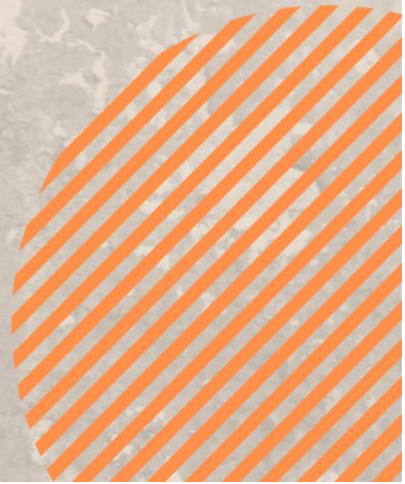


BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KAB. JEMBER

TAHUN 2024

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Tata Pemerintahan. Kinerja Bagian Tata Pemerintahan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024.

Jember, 10 Februari 2025

Kepala Bagian Tata Pemerintahan



Ervan Setiawan, S.STP, MM.

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	3
E. SARANA PRASARANA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN.....	4
F. ANGGARAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN.....	7
G. ISU STRATEGIS.....	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	11
C. PERJANJIAN KINERJA	18
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	23
A. KERANGKA PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	23
B. CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN.....	24
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN	31
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	53
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	55
F. REALISASI ANGGARAN	66
BAB IV. PENUTUP.	69

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026. **Rumusan Tujuan** Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel**” antara lain sebagai berikut:

1. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah;
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakeholder*;
4. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
5. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Perubahan Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Peningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu)

indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **Sangat Tinggi**.

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **Sangat Tinggi**.

Sasaran 3 Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah mendapat predikat nilai **Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Tinggi**.

Sasaran 4 Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Tinggi**.

Sasaran 5 Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Tinggi**.

Sasaran 6 Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Tinggi**.

Sasaran 7 Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sedang**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sedang**.

Sasaran 8 Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sangat**

Rendah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Rendah.**

Sasaran 9 Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi.** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Tinggi.**

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Bagian Tata Pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 6 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Tinggi**, 1 indikator capaiannya **Tinggi**, 1 indikator capaian dalam kategori **Sedang** dan 1 indikator capaian dalam kategori **Sangat Rendah.**

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.686.000.000. 98% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp Rp 5.597.932.822 dan Belanja Modal sebesar 2% atau sebesar Rp. 88.067.178

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.229.401.825 atau 39% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan:

1. Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah anggaran pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD tidak dicairkan karena dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut tidak membutuhkan lembur.
2. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terserap

sebesar 31% karena anggaran tersebut sifatnya antisipatif sehingga walaupun dengan serapan tersebut, target kinerja telah terpenuhi.

3. Pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah anggaran pada sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tidak dicairkan karena dalam pelaksanaan sub-sub kegiatan tersebut tidak membutuhkan lembur.
4. Pada Kegiatan Penataan Organisasi anggaran pada sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah terserap 36% karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga event bimtek LPPD tidak dapat terselenggara.
5. Pada kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah, ada event Rakerwil APKASI yang tidak dilaksanakan karena jadwalnya mendekati Pilkada sehingga dikhawatirkan tingkat kehadiran Kabupaten-Kabupaten undangan rendah.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Proses yang lama dalam mengumpulkan data oleh OPD;
2. Kurangnya usaha OPD dalam melengkapi data yang sesuai permintaan;
3. Anggaran fisik pemetaan dan toponimi yang terbatas setiap tahunnya;
4. Keterbatasan operator aplikasi dan SDM yang memiliki kualifikasi teknis pemetaan dan topografi wilayah;
5. Belum adanya peraturan pelaksana teknis mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
6. Dalam hal pendelegasian, belum terdapat pengaturan baku dalam delengasi kewenangan Bupati kepada Camat;
7. Belum terdapat aturan teknis mengenai kelurahan dan pendelegasian wewenang;
8. Dinamika lapangan yang harus segera disikapi oleh aparaturnya memerlukan proses koordinasi yang intens dan berjenjang.
9. Kurangnya pemahaman perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kerja sama daerah untuk memformulasikan rancangan kerja sama dan memenuhi tahapan penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan Permendagri

No. 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Pemerintah dengan Pihak Ketiga;

10. Proses kerjasama antar daerah terkadang terhambat oleh kebijakan pemimpin daerah lainnya untuk lebih bersikap terbuka dan mengerti pentingnya kerja sama sudah dapat terwadahi dalam kerangka APKASI Korwil Jawa Timur.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

1. Mengadakan pra persiapan penyusunan LPPD dan SPM pada tahun n-1 agar OPD dapat menyiapkan data-data yang dibutuhkan sebelum penyusunan dan melakukan desk terhadap data-data tersebut supaya pada saat penyusunan telah diperoleh data yang matang.
2. Perlu adanya bimtek evaluasi LPPD pada capaian kinerja OPD.
3. Menghadirkan narasumber handal terkait penyusunan LPPD pada Bimtek LPPD.
4. Perlunya penunjang kegiatan berupa honor kegiatan bagi OPD dalam menyusun LPPD.
5. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan peningkatan koordinasi dengan pendukung acara.
6. Mereviu peraturan lokal yang ada mengenai pelaksanaan PATEN di Kecamatan.
7. Monev Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan pendekatan substantif kinerja keurahan dan kecamatan.
8. Fasilitasi kinerja kecamatan dan kelurahan melalui rapat koordinasi intensif.
9. Perlunya koordinasi lanjutan setelah rakor agar hasil rakor dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
10. Perlu OPD yang membidangi untuk hadir pada saat rakor sesuai dengan tupoksinya.
11. Mengoptimalkan peran dan keterlibatan TKKSD dalam penyusunan rancangan kerja sama

12. Optimalisasi kerja sama antar daerah melalui APKASI Korwil Jatim sehingga dapat lebih mempererat saling keterhubungan dan keterikatan antar kabupaten di Jawa Timur;
13. Mensosialisasikan kepada perangkat daerah terkait SOP tahapan penyusunan dokumen kerja sama dan memberikan review rancangan dokumen kerja sama
14. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penegasan batas wilayah.
15. Pengusulan formasi ASN melalui anjab, ABK, dan Bezetting pegawai kepada Bagian Organisasi dan BKPSDM untuk formasi teknis pemetaan dan topografi wilayah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Bagian Tata Pemerintahan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Tata Pemerintahan adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Tata Pemerintahan.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 44 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris Daerah melalui Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah,

serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(4) Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, serta otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(5) Susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
5.
 1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
 2. Sub Bagian Kerjasama
 3. Sub Bagian Otonomi Daerah

D. SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Bagian Tata Pemerintahan yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024

tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Bagian Tata Pemerintahan yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 8 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 23 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 9 orang atau 61 %. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	1				1	1					1	1	
2. Pengawas													
3. Pelaksana		6		6		4		2		2		1	3
Jabatan Fungsional				9	1	4				3	1	2	2
Non ASN						7		4		3		4	3
Jumlah	1	6	0	15	2	16	0	6	0	8	2	6	8

Sumber : Data Kepegawaian Bagian Tata Pemerintahan 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Bagian Tata Pemerintahan belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Bagian Tata Pemerintahan.

E. SARANA PRASARANA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Bagian Tata Pemerintahan menempati gedung di Jl. Sudarman nomor 1 Jemberlor, Patrang.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Bagian Tata Pemerintahan Cukup memadai, karena telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan

untuk menunjang kinerja pegawai dan pelayanan publik. Adapun data sarana dan prasarana pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Bagian Tata Pemerintahan
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	GPS Handheld	1	Baik	1
2	Proyektor	1	Baik	1
3	Penghancur Kertas	1	Baik	1
4	Kursi Kantor	2	Baik	2
5	PC All In One	1	Baik	1
6	AC	5	Baik	5
7	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	1
8	Brankas	1	Baik	1
9	Buffet Rak	2	Baik	2
10	Camera Digital	2	1 Baik 1 Rusak	2
11	CPU	14	12 Baik 2 Rusak	14
12	Dinding Pertisi Tempat SH	1	Baik	1
13	Dinding Penyekat Westafel	1	Baik	1
14	Faximile	1	Baik	1
15	Gorden	1	Baik	1
16	GPS Distomer	1	Baik	1
17	Handycam	1	Baik	1
18	Jaringan Telepon	1	Baik	1
19	Karpet	1	Baik	1
20	Kompas	1	Baik	1
21	Komputer PC	2	Baik	2
22	Kursi Eselon III	1	Baik	1
23	Kursi Eselon IV	4	Baik	4
24	Kursi Tamu	2	Baik	2

25	Lantai Multiplek	1	Baik	1
26	Laptop	5	Baik	5
27	LCD Infocus	1	Baik	1
28	Lemari kaca	4	Baik	4
29	Lemari Besi	8	Baik	8
30	Lemari Gantung	1	Baik	1
31	Lemari Samping	3	Baik	3
32	Meja Kerja Kasubbag	3	Baik	3
33	Meja Panjang	1	Baik	1
34	Meja Samping	10	Baik	10
35	Meja Siku	1	Baik	1
36	Meja Staf	12	Baik	12
37	Mesin Ketik	1	Rusak	1
38	Monitor	15	14 Baik 1 Rusak	15
39	Notebook	4	Baik	4
40	Papan Struktur	1	Baik	1
41	PC	2	Baik	2
42	Pintu Sliding+reel	1	Baik	1
43	Printer	7	4 Baik 3 Rusak	7
44	Radio	1	Rusak	1
45	Rak Arsip Buffet	1	Baik	1
46	Rak Gantung	2	Baik	2
47	Rak Penyangga	4	Baik	4
48	Rak TV dan tempat brankas	1	Baik	1
49	Televisi	2	1 Baik 1 Rusak	2
50	Tripod	1	Baik	1
51	Unit Power Suply	5	Baik	5
52	Komputer	1	Baik	1
53	Mesin Absen	1	Baik	1
54	Laptop	2	Baik	2

55	LCD Projector	1	Baik	1
56	Kursi Putar	4	Baik	4
57	PC Unit	1	Baik	1
58	Camera Digital	1	Baik	1
59	Laptop	3	Baik	3
60	Printer	3	Baik	3
61	PC Unit	5	Baik	5
62	Tenda	11	Baik	11
63	Sepeda Motor	9	8 Baik 1 Rusak	9
64	Mobil	1	Baik	1
	Jumlah	189		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024

F. ANGGARAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Bagian Tata Pemerintahan memiliki 2 Program, 9 Kegiatan, dan 18 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.686.000.000,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.460.546.640,-
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 26.945.900,-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.911.570,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp. 6.432.170,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp. 5.740.000,-

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Rp. 4.913.600,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Rp. 4.948.560,-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.700.076.968,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.700.076.968,-
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 10.758.070,-
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 5.248.746,-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 5.509.324,-
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 378.170.275,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 18.743.063,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 24.807.212,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 334.620.000,-
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 159.051.937,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 159.051.937,-
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 23.100.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 23.100.000,-
1.7	Kegiatan Penataan Organisasi	Rp. 162.443.490,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 162.443.490,-
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 3.225.453.360,-
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.542.846.960,-
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 463.512.900,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 335.007.800,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 1.744.326.260,-
2.2	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp. 682.606.400,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 682.606.400,-
	JUMLAH	Rp. 5.686.000.000,-

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Bagian Tata Pemerintahan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Adanya perubahan penggunaan peta dasar berdasarkan kebijakan satu peta oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dari yang awalnya menggunakan skala 1:10.000 berubah menjadi menggunakan skala 1:5000 sehingga dibutuhkan waktu untuk merubah seluruh peta untuk disesuaikan dengan skala yang berlaku;
2. Kondisi kontur Kabupaten Jember yang bervariasi dengan wilayah yang luas sehingga butuh waktu yang lebih lama dalam penamaan unsur-unsur rupa bumi serta perhatian khusus dalam penginventarisiran batas wilayah kecamatan dan kelurahan;
3. Kurangnya komitmen sebagian petugas penyusun LPPD mengakibatkan ketidaksinkronan data dan dokumen pendukung yang disampaikan;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan kewenangan perijinan yang telah dilimpahkan kepada Camat sehingga perubahan pelayanan di Kecamatan baru sebatas pada semakin baiknya mekanisme pelayanan serta tempat pelayanan;
5. Kurang meratanya distribusi pegawai di Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
6. Belum tersusunnya Peraturan Bupati tentang LKK.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Bagian Tata Pemerintahan merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Bagian Tata Pemerintahan Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Bagian Tata Pemerintahan yaitu

Misi : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”

Tujuan : **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik”**

Sasaran : **Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2021-2026

Tujuan 1: Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Indikator Tujuan : Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (dokumen,%)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
SEBELUM PERUBAHAN							
Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember	Persentase OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk	95%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat	Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan	60%	70%	80%	85%	90%	95%

daerah	dan otonomi daerah						
	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	85%	90%	95%	97%	100%	100%
	Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	90%	95%	95%	95%	97%	98%
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	90%	92%	95%	97%	97%	98%
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	91%	95%	97%	97%	98%	98%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	65%	70%	85%	90%	93%	95%

Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	94%	95%	96%	96%	98%	100%
	Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	94%	95%	96%	96%	98%	100%
SETELAH PERUBAHAN							
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai			100	100	100	100

Bagian Tata Pemerintahan	kebutuhan Perangkat Daerah						
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi			96,14	96,60	97,35	97,80
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti			100	100	100	100

Renstra Perubahan Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat

(*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase PD yang melaporkan data LPPD sesuai ketentuan	<p>Formulasi : (Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan sesuai pedoman dibagi Jumlah OPD pengampu urusan LPPD) dikali 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PD pengampu urusan LPPD sebanyak 28 PD berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 - Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 	Data LPPD Bagian Tata Pemerintahan	KPA Kepala Bagian Tata Pemerintahan PPTK
	Persentase Laporan SPM yang tersusun sesuai ketentuan	<p>Formulasi : Jumlah laporan SPM yang tersusun sesuai ketentuan dibagi Jumlah SPM</p>		

		<p>yang seharusnya tersusun berdasarkan ketentuan per UU an) kali 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <p>a) Jumlah laporan SPM yang tersusun sebanyak 1 Dokumen, yaitu berisi bidang Pendidikan dan Kesehatan, PU dan Cipta Karya, Trantibum Linmas, dst.</p> <p>b) Penyusunan SPM berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM</p>		
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan , Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	<p>Formulasi :</p> <p>Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan yang Terasilitasi dibagi Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan sesuai ketentuan dikali 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Data capaian</p>	Data Capaian Administrasi Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan	KPA Kepala Bagian Tata Pemerintahan PPTK

		administrasi tata pemerintahan diperoleh dari data berupa Laporan Kegiatan Monev Kecamatan dan Kelurahan		
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama (PKS) yang ditindaklanjuti	<p>Formulasi : Jumlah Capaian Kesepakatan dan PKS yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Capaian Kesepakatan dan PKS sesuai ketentuan dibagi 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kriteria Kesepakatan dan PKS yang ditindaklanjuti, adalah yang telah mengisi data lengkap pada laman tapem.jemberkab.go.id - Kesepakatan dan PKS yang sesuai ketentuan adalah yang memenuhi peraturan berdasarkan permendagri nomor 22 tahun 2020. 	Data Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan	KPA Kepala Bagian Tata Pemerintahan PPTK

Sumber : Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan nomor 065/13.3/1.11/2024 tentang Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024. Terdapat penambahan indikator penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan untuk pembinaan dan fasilitasi Perangkat Daerah Kewilayahan, yaitu penghargaan” Penghargaan camat terbaik dari Provinsi Jawa Timur”.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100 %
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100 %
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%

4.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100 %
5.	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100 %
6.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %
7.	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen LPPD dan SPM yang Tersusun	100%
8.	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata Pemerintahan yang terfasilitasi	96,60%
9.	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%
10.	Penghargaan camat terbaik dari Provinsi Jawa Timur	Diperolehnya Penghargaan camat terbaik dari Provinsi Jawa Timur	5 Besar Provinsi

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024

- | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|-------|
| 1 | Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Rp. 2.460.546.640,- | Sumber APBD | Dana: |
| 2 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Rp. 3.225.453.360,- | Sumber APBD | Dana: |
| | Jumlah | Rp. 5.686.000.000,- | | |

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.460.546.640,-
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 26.945.900,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Rp. 4.948.560,-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.700.076.968,-
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 10.758.070,-
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 378.170.275,-
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 159.051.937,-

1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 23.100.000,-
1.7	Kegiatan Penataan Organisasi	Rp. 162.443.490,-
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 3.225.453.360,-
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.542.846.960,-
2.2	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp. 682.606.400,-
	JUMLAH	Rp. 5.686.000.000,-

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Bagian Tata Pemerintahan terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.460.546.640,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.460.546.640,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 1,10% dari keseluruhan belanja Bagian Tata Pemerintahan.

- b) Sasaran Strategis II : Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.460.546.640,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.460.546.640,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 69,09% dari keseluruhan belanja Bagian Tata Pemerintahan.

- c) Sasaran Strategis III : Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.460.546.640,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.460.546.640,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 0,44% dari keseluruhan belanja Bagian Tata Pemerintahan.
- d) Sasaran Strategis IV : Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan
- Didukung oleh :
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.460.546.640,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.460.546.640,- yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 15,37% dari keseluruhan belanja Bagian Tata Pemerintahan.
- e) Sasaran Strategis V : Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan
- Didukung oleh :
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.460.546.640,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.460.546.640,- yang dialokasikan untuk sasaran V adalah sebesar 6,46% dari keseluruhan belanja Bagian Tata Pemerintahan.
- f) Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan
- Didukung oleh :
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.460.546.640,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.460.546.640,- yang dialokasikan untuk sasaran VI adalah sebesar 0,94% dari keseluruhan belanja Bagian Tata Pemerintahan.

g) Sasaran Strategis VII : Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.460.546.640,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.460.546.640,- yang dialokasikan untuk sasaran VII adalah sebesar 6,60% dari keseluruhan belanja Bagian Tata Pemerintahan.

h) Sasaran Strategis VIII : Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah

Didukung oleh :

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Anggaran Rp. 3.225.453.360,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 3.225.453.360,- yang dialokasikan untuk sasaran VIII adalah sebesar 78,84% dari keseluruhan belanja Bagian Tata Pemerintahan.

i) Sasaran Strategis IX : Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah

Didukung oleh :

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Anggaran Rp. 3.225.453.360,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 3.225.453.360,- yang dialokasikan untuk sasaran XI adalah sebesar 21,16% dari keseluruhan belanja Bagian Tata Pemerintahan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Bagian Tata Pemerintahan dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Bagian Tata Pemerintahan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100 %)	7	8 (5/7*100 %)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan,	Persentase Dokumen Perencanaan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun					
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100 %	74,3%	74,3%	100%	74,3%
5.	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100 %	14%	14%	100%	14%
6.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen LPPD dan SPM yang Tersusun	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan,	Persentase administrasi Tata Pemerintahan yang	96,60 %	100%	103%	98,70%	101%

	dan Otonomi Daerah	terfasilitasi					
9.	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	84%	84%	100%	84%

Sumber Data Realisasi : Bagian Tata Pemerintahan

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 9 indikator sasaran Bagian Tata Pemerintahan rata rata mencapai 85,8% dan masuk dalam kategori tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan 85,9%. Dengan demikian maka secara umum Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%	100%

Peningkatan Administrasi Pada Bagian Pemerintahan	Kualitas Barang Tata	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	0%	100%	100%
Peningkatan Administrasi Pada Bagian Pemerintahan	Kualitas Umum Tata	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Pengadaan Milik Daerah Pada Bagian Pemerintahan	Kualitas Barang Pada Tata	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	0%	100%	14%
Peningkatan Pemeliharaan Milik Daerah Pada Bagian Pemerintahan	Kualitas Barang Pada Tata	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kualitas Daerah	Persentase Dokumen LPPD dan SPM yang Tersusun	50%	100%	100%	100%
Peningkatan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Otonomi Daerah	Kualitas dan	Persentase administrasi Tata Pemerintahan yang terfasilitasi	72,8%	95%	96,14%	96,60%
Peningkatan Kerjasama Daerah	Kualitas	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	296%	102%	96,5%	84%

Sumber Data Realisasi: Data Realisasi Bagian Tata Pemerintahan

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi konsisten sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi konsisten sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi menurun dalam kurun tahun 2021 s.d 2022, meningkat dalam kurun tahun 2022 s.d 2023, dan konsisten dalam kurun tahun 2023 s.d 2024 sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi konsisten sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 5: Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi menurun pada dalam kurun tahun 2021 s.d 2022, meningkat dalam kurun tahun 2022 s.d 2023 dan menurun dalam kurun tahun 2023 s.d 2024 sejak kurun waktu tahun 2023 s.d 2024.

Sasaran Strategis 6: Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi konsisten sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 7: Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi meningkat dalam kurun tahun 2021 s.d 2022, dan konsisten dalam kurun 2022 s.d 2024 sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 8: Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi meningkat sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 9: Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi konsisten melebihi target dalam kurun tahun 2021 s.d 2022, menurun dalam kurun tahun 2022 s.d 2023, dan meningkat dalam kurun tahun 2023 s.d 2024 sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Bagian Tata Pemerintahan dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th.	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	-	
	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	-	
	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	-	
	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	-	
	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	14%	-	

	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Daerah Bagian Pemerintahan Milik Pada Tata	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	-	
	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen LPPD dan SPM yang Tersusun	100%	-	
	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata Pemerintahan yang terfasilitasi	96,60%	-	
	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang diti ndaklanjuti	84%	-	

Sumber Data: Data Realisasi Bagian Tata Pemerintahan

Realisasi kinerja atas indikator Persentase Dokumen LPPD dan SPM yang Tersusun tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serap an Angg aran
Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.911.570	Rp. 2.965.000	60%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp. 6.432.170	Rp. 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp. 5.740.000	Rp. 2.692.800	42%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp. 4.913.600	Rp. 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA- SKPD	Rp. 4.948.560	Rp. 2.345.000	47%
Total		Rp. 26.945.900	Rp. 8.002.800	30%

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.700.076.968	Rp. 526.808.290	31%
Total		Rp. 1.700.076.968	Rp. 526.808.290	31%
Sasaran 3 : Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 5.248.746	Rp. 0	0%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 5.509.324	Rp. 0	0%
Total		Rp. 10.758.070	Rp. 0	0%
Sasaran 4 : Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 18.743.063	Rp. 6.075.000	32%

	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 24.807.212	Rp. 15.353.000	62%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 334.620.000	Rp. 287.676.060	86%
Total		Rp. 378.170.275	Rp. 309.104.060	82%
Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 159.051.937	Rp. 6.250.000	4%
Total		Rp. 159.051.937	Rp. 6.250.000	4%
Sasaran 6 : Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 23.100.000	Rp. 14.055.000	61%
Total		Rp. 23.100.000	Rp. 14.055.000	61%

Sasaran 7 : Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggara an Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Penataan Organisasi			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Rp. 162.443.490	Rp. 58.189.000	36%
Total		Rp. 162.443.490	Rp. 58.189.000	36%
Sasaran 8 : Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 463.512.900	Rp. 15.515.000	3%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 335.007.800	Rp. 245.050.180	73%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 1.744.326.260	Rp. 757.569.895	43%
Total		Rp. 2.542.846.960	Rp. 1.012.055.075	40%
Sasaran 9 : Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 682.606.400	Rp. 288.857.600	42%
Total		Rp. 682.606.400	Rp. 288.857.600	42%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 4.911.5	Rp. 2.965.000
Output	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen

Keterangan:

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini dari target 7 dokumen telah terealisasi 7 Dokumen yaitu:

1. Ranwal Renja 2025
2. Rankhir Renja 2025
3. Rencana Kinerja Tahunan 2024
4. Rencana Aksi 2024
5. Indikator Kinerja Utama 2024
6. Perjanjian Kinerja 2024
7. Pohon Kinerja 2024

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

2. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 6.432.170	Rp. 0
Output	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Keterangan:

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target 2 dokumen telah terealisasi 2 dokumen yaitu:

1. Dokumen RKA Bagian Tata Pemerintahan 2025;
2. Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Bagian Tata Pemerintahan 2025.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

3. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 5.740.000	Rp. 2.692.800
Output	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Keterangan:

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target 2 dokumen telah terealisasi 2 dokumen yaitu:

1. Dokumen Perubahan RKA Bagian Tata Pemerintahan 2024;
2. Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Bagian Tata Pemerintahan 2024.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

4. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 4.913.600	Rp. 0
Output	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Keterangan:

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target 2 dokumen telah terealisasi 2 dokumen yaitu:

1. Dokumen DPA Bagian Tata Pemerintahan 2025;
2. Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Bagian Tata Pemerintahan 2025.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

5. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 4.948.560	Rp. 2.345.000
Output	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan target 2 dokumen telah terealisasi 2 dokumen yaitu:

1. Dokumen Perubahan DPA Bagian Tata Pemerintahan 2024;
2. Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Bagian Tata Pemerintahan 2024.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata adalah sebagai berikut:

6. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 1.700.076.968	Rp. 526.808.290
Output	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen

Keterangan:

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 50 Dokumen telah terealisasi 50 dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terdiri dalam 1 (satu) tahun terdiri dari 6 (enam) item, yaitu belanja peralatan dan perlengkapan kantor, belanja natura dan pakan natura, belanja perabot kantor, belanja mamin aktivitas lapangan, belanja tagihan air.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

7. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 5.248.746	Rp. 0
Output	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Keterangan:

Pada Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 1 Dokumen telah terealisasi 1 dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

8. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 5.509.324	Rp. 0
Output	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Keterangan:

Pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 1 laporan telah terealisasi 1 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

9. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 18.743.063	Rp. 6.075.000
Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5 paket	3 paket

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Target 5 paket terealisasi sebanyak 3 dikarenakan stok barang cetak dari tahun sebelumnya masih ada.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

10. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 24.807.212	Rp. 15.353.000
Output	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	8 Laporan	5 Laporan



Keterangan:

Pada sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu terdapat target 8 laporan fasilitasi kunjungan. Realisasi sub kegiatan ini adalah 5 laporan kunjungan tamu atau sebesar 62% dari target. Hal ini disebabkan karena sub kegiatan ini dijalankan sesuai jumlah kebutuhan dari penerimaan kunjungan tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Jember.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

11. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 334.620.000	Rp. 287.676.060
Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50 Laporan	50 Laporan

Keterangan:

Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 50 Laporan telah terealisasi sebanyak 50 laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan ini mendukung kegiatan operasional pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi pada Bagian Tata Pemerintahan.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

12. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 159.051.937	Rp. 6.250.000
Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7 Unit	1 Unit



1 Unit AC

Keterangan:

Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya menunjukkan adanya target 7 unit pengadaan dan terealisasi 1 unit atau 14%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya 6 unit pengadaan barang tersebut dalam dokumen RKB.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

13. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 23.100.000	Rp. 14.055.000
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7 Unit	7 Unit

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

14. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penataan Organisasi

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 162.443.490	Rp. 58.189.000
Output	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen



Keterangan:

1. Dokumen LPPD

Dalam penyusunan dokumen LPPD, Bagian Tata Pemerintahan bertindak sebagai penghimpun laporan dari OPD-OPD pengampu urusan LPPD. Ada sebanyak 28 OPD pengampu urusan LPPD. Adapun OPD-OPD pengampu tersebut adalah:

1. Inspektorat
2. Satuan Polisi Pamong Praja
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana
8. Dinas Pendidikan
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Sosial
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Tenaga Kerja
14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
18. Dinas Perikanan
19. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Alam
20. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya
21. Dinas Lingkungan Hidup
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

27. Dinas Komunikasi dan Informatika

28. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan penyusunan LPPD sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

2. Dokumen SPM

Dalam penyusunan dokumen SPM, Bagian Tata Pemerintahan bertindak sebagai penghimpun laporan dari OPD-OPD pengampu urusan SPM. Ada sebanyak 28 OPD pengampu urusan SPM. Adapun OPD-OPD pengampu tersebut adalah:

1. Satuan Polisi Pamong Praja
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya

Kendala umum penyebab realisasi yang rendah adalah:

1. Kegiatan bimtek yang tidak terselenggara dikarenakan penyusunan LPPD dan SPM membutuhkan waktu panjang sehingga anggaran untuk kegiatan Bimtek tersebut tidak terserap.
2. Pada bulan Juli ada kebijakan untuk tidak diperbolehkan menggunakan anggaran jasa konsultasi sehingga penyusunan SPM tidak menggunakan pihak ketiga. Oleh karena itu anggaran untuk jasa konsultasi penyusunan renaksi SPM tidak terserap.

Kendala lain yang dihadapi oleh Bagian Tata Pemerintahan dalam penyusunan dokumen LPPD dan SPM adalah kurangnya komitmen sebagian petugas penyusun LPPD mengakibatkan ketidaksinkronan data dan dokumen pendukung yang disampaikan.

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

15. Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 463.512.900	Rp. 15.515.000
Output	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

16. Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 335.007.800	Rp. 245.050.180
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen



Sosialisasi dan Pelaksanaan Penegasan Batas Kelurahan dengan Desa



Pelaksanaan Penegasan Batas Kelurahan dengan Desa Tahun 2024



Penandatanganan Peta Batas Wilayah Kelurahan dan Desa



Penandatanganan Berita Acara Batas Wilayah Kelurahan dan Desa



Kegiatan toponimi pada unsur alami, buatan, dan budaya

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

17. Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 1.744.326.260	Rp. 757.569.895
Output	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen



Pada sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bagian Tata Pemerintahan memfasilitasi 3 (dua) pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar, yaitu Upacara Peringatan Hari Jadi Jember, Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Upacara Hari Jadi Provinsi Jatim. Adapun bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Upacara Peringatan Hari Jadi Jember

Penyediaan mamirat dan mamiri peserta upacara, cetak spanduk dan baliho untuk Kecamatan

2. Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Penyediaan Souvenir, mamirat dan mamiri peserta upacara, cetak spanduk dan Baliho untuk Kecamatan, dan tenda

3. Upacara Hari Jadi Provinsi Jatim

Penyediaan mamirat dan mamiri panitia upacara, gardening, dan cetak spanduk dan baliho untuk kecamatan

Adapun penyerapan anggaran mencapai 43% dari target disebabkan oleh:

1. Adanya pembagian tugas dengan OPD lain pada saat penyelenggaraan 3 (tiga) upacara hari besar tersebut sehingga anggaran untuk Jasa Penyelenggaraan Acara tidak perlu digunakan.
2. Adanya penambahan pelimpahan kewenangan diluar perencanaan Bagian Tata Pemerintahan yaitu penyusunan dokumen LKPJ yang awalnya diampu oleh OPD lain sehingga ada beberapa event dalam sub kegiatan Fasilitasi Otonomi Daerah yang tidak dapat terlaksana karena waktu pengerjaan yang telah direncanakan difokuskan untuk pelimpahan kewenangan diluar perencanaan tersebut.

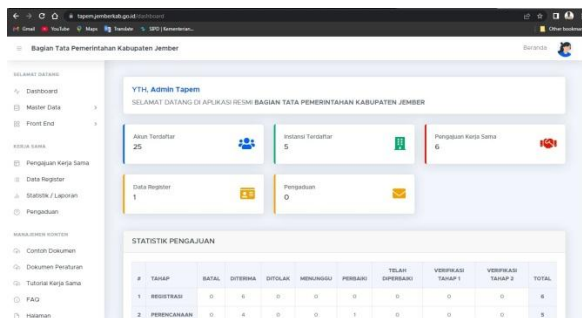
Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah adalah sebagai berikut :

18. Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 682.606.400	Rp. 288.857.600
Output	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	50 Dokumen	42 Dokumen



Laman Kerja Sama Daerah di tapem.jemberkab.go.id



Bimtek Kerja Sama Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024



Sosialisasi Lanjutan Pengajuan Kerja Sama melalui Website Kerja Sama Daerah



Pembahasan Finalisasi Kerja Sama Program RPL



Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Kerja
APKASI Korwil Jawa Timur Tahun 2024

Pada sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan target 50 Dokumen terealisasi 42 dokumen. Sub kegiatan ini juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut diatas yaitu:

1. Pembuatan Laman Kerja Sama Daerah pada web tapem.jemberkab.go.id
2. Bimtek Kerja Sama Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024
3. Sosialisasi Lanjutan Pengajuan Kerja Sama melalui Website Kerja Sama Daerah
4. Pembahasan Finalisasi Kerja Sama Program RPL
5. Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Kerja APKASI Korwil Jawa Timur Tahun 2024

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Bagian Tata Pemerintahan berjumlah 16 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.686.000.000, melaksanakan 2 Program 9

kegiatan dan. 18 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	100%	30%	Efisien
2. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	100%	31%	Efisien
3. Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	100%	0%	Efisien
4. Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	74,3%	82%	Tidak Efisien
5. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	14%	4%	Efisien
6. Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	100%	61%	Efisien
7. Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	36%	Efisien
8. Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah	100%	40%	Efisien
9. Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	84%	42%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan dapat dikategorikan tidak efisien karena % capaian kinerja lebih kecil daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5: Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6: Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 7: Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 8: Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 9: Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan						
Indikator 1 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	√				
Sasaran 2 Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan						
Indikator 2 Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	√				
Sasaran 3 Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata						

Pemerintahan						
Indikator 3 Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	√				
Sasaran 4 Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan						
Indikator 4 Persentase administrasi umum yang dikelola	74,3%			√		
Sasaran 5 Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan						
Indikator 5 Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	14%					√
Sasaran 6 Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan						
Indikator 6 Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	√				

Sasaran 7 Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
Indikator 7 Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%	√				
Sasaran 8 Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah						
Indikator 8 Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	100%	√				
Sasaran 9 Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah						
Indikator 9 Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	84%		√			

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain

- 1) Adanya keterlambatan pembaharuan data realisasi pada SIPD mengakibatkan terkendala pada pengisian realisasi anggaran pada

aplikasi SIPPD. Aplikasi dari SIPD belum menyediakan fitur realisasi secara real time sehingga data realisasi dilakukan secara manual;

- 2) Adanya kegiatan tambahan dari OPD lain yang tidak direncanakan dan dianggarkan sebagai tugas dan fungsi pada dokumen perencanaan.

Faktor pendorong keberhasilan antara lain:

- 1) Telah terpenuhinya target kinerja yaitu 7 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2 Dokumen RKA-SKPD, 2 Dokumen Perubahan RKA-SKPD, 2 Dokumen DPA-SKPD, dan 2 Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - 2) Adanya kerjasama seluruh anggota Bagian Tata Pemerintahan dalam menyediakan data perencanaan dan penganggaran.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah:
 - 1) Operator perlu lebih aktif dalam memperbaharui data realisasi
 - 2) Perencanaan dan penganggaran utamanya dalam hal pagu anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi
 - Rencana perbaikan kedepan Bagian Tata Pemerintahan akan lebih mengefektifkan penggunaan anggaran dengan cara mengevaluasi kinerja anggaran Bagian Tata Pemerintahan pada periode sebelumnya dalam rangka meningkatkan nilai capaian kinerja.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain:
 - 1) Adanya kekurangan SDM dalam pengerjaan SPJ mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan sehingga terkadang SDM kewalahan;

- 2) Adanya ketidaklengkapan dokumen oleh rekanan sehingga memperlambat pengerjaan SPJ karena harus menunggu rekanan tersebut melengkapi dokumen.
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain:
 - 1) Telah terpenuhinya target kinerja yaitu target sebesar 50 dokumen.
 - 2) Baiknya usaha dan kerjasama setiap individu dalam menyediakan bukti-bukti untuk melengkapi SPJ yang dibuat setiap bulannya sehingga memudahkan proses pembuatan SPJ.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah:
 - 1) Perlu adanya penambahan SDM pada Bagian Tata Pemerintahan.
 - 2) Perlu adanya penginformasian di awal tahun mengenai persiapan kelengkapan dokumen pada rekanan.
- Rencana perbaikan kedepan adalah pengoptimalan pemberdayaan SDM pada Bagian Tata Pemerintahan untuk pengerjaan SPJ dengan cara menugaskan personel yang telah menyelesaikan kegiatannya untuk membantu dalam pembuatan SPJ.

Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain adanya keterlambatan dalam pelaporan LRA karena LRA dilakukan bukan by system tetapi manual sehingga perlu sinkronisasi kembali terhadap realisasi keuangan dan SPJ pembelian barang (aset lancar dan aset tetap).
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain:
 - 1) Telah terpenuhinya kinerja yaitu target 1 Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan 1 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 2) Hasil rekonsiliasi sesuai dengan SPJ aset lancar dan LRA.

- Solusi terhadap kendala kedepan adalah perlunya kecepatan dalam pelaporan LRA untuk disesuaikan dengan hasil data input SIPERDA
- Rencana perbaikan kedepan operator akan membuat buku bantu untuk mempermudah mendapatkan informasi update tentang jumlah aset lancar serta menertibkan pencatatan keluar masuk aset lancar.

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan mencapai predikat sedang yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 74,3 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain Data ketersediaan Barang Cetak Penggandaan belum diupdate bulanan secara berkala.
- Faktor pendorong keberhasilan adalah terpenuhinya target kinerja sebesar 3 Paket Barang Cetak Penggandaan yang disediakan, 5 Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, dan 50 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah perlu adanya update berkala pada ketersediaan Barang Cetak Penggandaan sehingga dapat merencanakan paket yang akan diadakan dengan jumlah yang optimal.
- Rencana perbaikan kedepan membuat proyeksi kebutuhan paket barang cetak penggandaan.

Sasaran Strategis 5: Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan mencapai predikat sangat rendah yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 14 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain adanya kebijakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan dokumen RKB

- Faktor pendorong kegagalan antara lain tidak adanya item – item barang yang telah dialokasikan anggaran pengadaannya pada dokumen RKB.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah akan merencanakan pengadaan dalam dokumen RKB dan melaporkan pada BPKAD.
- Rencana perbaikan kedepan adalah lebih memperhatikan dalam penyusunan dokumen RKB.

Sasaran Strategis 6: Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain adalah:
 - 1) Terkadang hasil pemeliharaan masih kurang maksimal sehingga masih terjadi kerusakan pada kendaraan;
 - 2) Waktu tunggu sparepart yang lama pada bengkel resmi sehingga harus menunggu barang datang.
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain:
 - 1) Telah terpenuhinya target kinerja yaitu 7 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan dibayarkan Pajaknya;
 - 2) Adanya komunikasi yang baik antara Bagian Tata Pemerintahan dengan Bagian lain dalam hal pembayaran pajak kendaraan sehingga pembayaran pajak kendaraan dapat terlaksana dengan baik;
 - 3) Adanya anggaran yang dipersiapkan dengan baik untuk pemeliharaan kendaraan khususnya untuk unit yang mengalami perbaikan berat.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah:
 - 1) Perlu adanya penjaminan kualitas dari hasil perbaikan kendaraan yang dilakukan dari bengkel;
 - 2) Sebelum melakukan pemeliharaan sudah dilakukan estimasi dan pemesanan barang terlebih dahulu.

- Rencana perbaikan kedepan menjaga konsistensi baiknya kinerja pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sasaran Strategis 7: Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain:
 - 1) Proses yang lama dalam mengumpulkan data oleh OPD;
 - 2) Kurangnya usaha OPD dalam melengkapi data yang sesuai permintaan;
 - 3) Perlu adanya bimtek evaluasi LPPD dan SPM pada capaian kinerja OPD;
 - 4) Menghadirkan narasumber handal terkait penyusunan LPPD dan SPM pada Bimtek LPPD; dan
 - 5) Perlunya penunjang kegiatan berupa honor kegiatan bagi OPD dalam menyusun LPPD dan SPM
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain:
 - 1) Telah terpenuhinya 2 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah berupa LPPD dan SPM;
 - 2) Adanya kerjasama OPD untuk memenuhi kelengkapan data LPPD dan SPM.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah:
 - 1) Mengadakan bimtek evaluasi LPPD dan SPM pada capaian kinerja OPD;
 - 2) Mengadakan penunjang kegiatan berupa honor kegiatan bagi OPD dalam menyusun LPPD dan SPM.
- Rencana perbaikan kedepan adalah mengadakan pra persiapan penyusunan LPPD dan SPM pada tahun n-1 agar OPD dapat menyiapkan data-data yang dibutuhkan sebelum penyusunan dan melakukan desk

terhadap data-data tersebut supaya pada saat penyusunan telah diperoleh data yang matang.

Sasaran Strategis 8: Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain:
 - 1) Anggaran giat fisik pemetaan dan toponimi yang terbatas setiap tahunnya;
 - 2) Keterbatasan operator aplikasi dan SDM yang memiliki kualifikasi teknis pemetaan dan topografi wilayah;
 - 3) Belum adanya peraturan pelaksana teknis mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - 4) Dalam hal pendelegasian, belum terdapat pengaturan baku dalam delengasi kewenangan Bupati kepada Camat;
 - 5) Belum terdapat aturan teknis mengenai kelurahan dan pendelegasian wewenang;
 - 6) Dinamika lapangan yang harus segera disikapi oleh aparatur kewilayahan memerlukan proses koordinasi yang intens dan berjenjang.
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain:
 - 1) Telah terpenuhinya target kinerja yaitu dari target sebesar 7 dokumen terpenuhi 7 dokumen;
 - 2) Keberhasilan pelaksanaan mengenai rupabumi dan batas wilayah utamanya batas kelurahan serta inventaris nama rupabumi di beberapa kecamatan di Jember yang pada proses selanjutnya akan mendapatkan validasi verifikasi teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - 3) Kerja sama dengan pihak Topografi Kodam V Brawijaya dan Biro Administrasi Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur Menunjang terlaksananya kegiatan teknis Rupabumi dan batas wilayah;

- 4) Adanya semangat dalam pelaksanaan acara HUT Jatim, HUT Jember, dan HUT RI dan koordinasi antar OPD sesuai bidang tugas untuk penyelenggaraannya;
 - 5) Monev Kecamatan dan Kelurahan dapat dilaksanakan sehingga dapat diketahui kapasitas kelembagaan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kecamatan dan kelurahan serta kendala yang terjadi di lapangan.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan peningkatan koordinasi dengan pendukung acara;
 - 2) Pengusulan formasi ASN melalui anjab, ABK, dan Bezetting pegawai kepada Bagian Organisasi dan BKPSDM untuk formasi teknis;
 - 3) Monev Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan pendekatan substantif kinerja kelurahan dan kecamatan dan mempersiapkan peraturan lokal yang relevan;
 - 4) Fasilitasi kinerja kecamatan dan Kelurahan melalui rapat koordinasi intensif.
 - Rencana perbaikan kedepan:
 - 1) Mereviu peraturan lokal yang ada mengenai pelaksanaan PATEN di Kecamatan;
 - 2) Perlunya koordinasi lanjutan setelah rakor agar hasil rakor dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
 - 3) Perlu OPD yang membidangi untuk hadir pada saat rakor sesuai dengan tupoksinya;
 - 4) Alokasi anggaran untuk pelaksanaan giat fisik penegasan batas wilayah.

Sasaran Strategis 9: Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 84 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain:
 - 1) Kurangnya pemahaman perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kerja sama daerah untuk memformulasikan rancangan kerja sama dan

- memenuhi tahapan penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Pemerintah dengan Pihak Ketiga;
- 2) Proses kerjasama antar daerah terkadang terhambat oleh kebijakan pemimpin daerah lainnya untuk lebih bersikap terbuka dan mengerti pentingnya kerja sama sudah dapat terwadahi dalam kerangka APKASI Korwil Jawa Timur.
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain:
 - 1) Keberadaan Tim Kerja Sama Daerah (TKKSD) membantu dalam memberikan analisa dalam penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 2) Semangat kerjasama antar daerah dan lembaga yang didukung oleh kebijakan pimpinan untuk terus dapat meningkatkan kecepatan pembangunan melalui kerjasama;
 - 3) Peningkatan kemampuan dan literasi OPD teknis untuk menterjemahkan slogan visi dan misi bupati dalam bentuk peningkatan kinerja melalui kerjasama daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - 4) Adanya aplikasi kerjasama daerah membantu mempermudah proses pengajuan kerja sama.
 - Solusi terhadap kendala kedepan adalah mengoptimalkan peran dan keterlibatan TKKSD dalam penyusunan rancangan kerja sama.
 - Rencana perbaikan kedepan adalah optimalisasi kerja sama antar daerah melalui APKASI Korwil jatim sehingga dapat lebih mempererat saling keterhubungan dan keterikatan antar kabupaten di Jawa Timur.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.686.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 5.597.932.822 terealisasi sebesar Rp. 1.341.325.565,- (24%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 88.067.178 terealisasi sebesar Rp. 6.250.000,- (7%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.460.546.640	Rp. 922.409.150	37%
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 26.945.900	Rp. 8.002.800	30%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.911.570	Rp. 2.965.000	60%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Rp. 6.432.170	Rp. 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp. 5.740.000	Rp. 2.692.800	47%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Rp. 4.913.600	Rp. 0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Rp. 4.948.560	Rp. 2.345.000	47%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 1.700.076.968	Rp. 526.808.290	31%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.700.076.968	Rp. 526.808.290	31%
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 10.758.070	Rp. 0	0%
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 5.248.746	Rp. 0	0%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 5.509.324	Rp. 0	0%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 378.170.275	Rp. 309.104.060	82%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	Rp. 18.743.063	Rp. 6.075.000	32%

	Penggandaan			
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 24.807.212	Rp. 15.353.000	62%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 334.620.000	Rp. 287.676.060	86%
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 159.051.937	Rp. 6.250.000	4%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 159.051.937	Rp. 6.250.000	4%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 23.100.000	Rp. 14.055.000	61%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 23.100.000	Rp. 14.055.000	61%
1.7	Kegiatan Penataan Organisasi	Rp. 162.443.490	Rp. 58.189.000	36%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 162.443.490	Rp. 58.189.000	36%
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 3.225.453.360	Rp. 1.306.992.675	41%
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.542.846.960	Rp. 1.018.135.075	40%
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 463.512.900	Rp. 15.515.000	3%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 335.007.800	Rp. 245.050.180	73%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 1.744.326.260	Rp. 757.569.895	43%
2.2	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Rp. 682.606.400	Rp. 288.857.600	42%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 682.606.400	Rp. 288.857.600	42%
	JUMLAH	Rp. 5.686.000.000	Rp. 288.857.600	39%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Bagian Tata Pemerintahan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Tata Pemerintahan disimpulkan bahwa secara umum Bagian Tata Pemerintahan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 10 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, sebanyak 1 indikator mencapai target dengan kategori Tinggi, sebanyak 1 indikator mencapai target dengan kategori sedang dan sebanyak 2 indikator tidak mencapai target dengan kategori sangat rendah.

Terkait dengan hal tersebut, kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Adanya kebijakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan dokumen RKB
2. Ketatnya persaingan dalam memperoleh penghargaan sebagai camat terbaik oleh Provinsi Jawa Timur

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Terpenuhinya target kinerja Bagian Tata Pemerintahan
2. Adanya kerjasama seluruh anggota Bagian Tata Pemerintahan dalam menyediakan data perencanaan dan penganggaran
3. Baiknya usaha dan kerjasama setiap individu dalam menyediakan bukti-bukti untuk melengkapi SPJ yang dibuat setiap bulannya sehingga memudahkan proses pembuatan SPJ.
4. Hasil rekonsiliasi sesuai dengan SPJ aset lancar dan LRA

5. Adanya komunikasi yang baik antara Bagian Tata Pemerintahan dengan Bagian lain dalam hal pembayaran pajak kendaraan sehingga pembayaran pajak kendaraan dapat terlaksana dengan baik
6. Adanya anggaran yang dipersiapkan dengan baik untuk pemeliharaan kendaraan khususnya untuk unit yang mengalami perbaikan berat
7. Adanya kerjasama OPD untuk memenuhi kelengkapan data LPPD dan SPM
8. Keberhasilan pelaksanaan mengenai rupabumi dan batas wilayah utamanya batas kelurahan serta inventaris nama rupabumi di beberapa kecamatan di Jember yang pada proses selanjutnya akan mendapatkan validasi verifikasi teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG);
9. Kerja sama dengan pihak Topografi Kodam V Brawijaya dan Biro Administrasi Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur Menunjang terlaksananya kegiatan teknis Rupabumi dan batas wilayah;
10. Adanya semangat dalam pelaksanaan acara HUT Jatim, HUT Jember, dan HUT RI dan koordinasi antar OPD sesuai bidang tugas untuk penyelenggaraannya;
11. Monev Kecamatan dan Kelurahan dapat dilaksanakan sehingga dapat diketahui kapasitas kelembagaan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kecamatan dan kelurahan serta kendala yang terjadi di lapangan.
12. Keberadaan Tim Kerja Sama Daerah (TKKSD) membantu dalam memberikan analisa dalam penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
13. Semangat kerjasama antar daerah dan lembaga yang didukung oleh kebijakan pimpinan untuk terus dapat meningkatkan kecepatan pembangunan melalui kerjasama;
14. Peningkatan kemampuan dan literasi OPD teknis untuk menterjemahkan slogan visi dan misi bupati dalam bentuk peningkatan kinerja melalui kerjasama daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga;
15. Adanya aplikasi kerjasama daerah membantu mempermudah proses pengajuan kerja sama.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Bagian Tata Pemerintahan akan lebih mengefektifkan penggunaan anggaran dengan cara mengevaluasi kinerja anggaran Bagian Tata Pemerintahan pada periode sebelumnya dalam rangka meningkatkan nilai capaian kinerja;
2. Pengoptimalan pemberdayaan SDM pada Bagian Tata Pemerintahan untuk pengerjaan SPJ dengan cara menugaskan personel yang telah menyelesaikan kegiatannya untuk membantu dalam pembuatan SPJ;
3. Operator akan membuat buku bantu untuk mempermudah mendapatkan informasi update tentang jumlah aset lancar serta menertibkan pencatatan keluar masuk aset lancar;
4. Membuat proyeksi kebutuhan paket barang cetakan penggandaan;
5. Lebih memperhatikan dalam penyusunan dokumen RKB;
6. Menjaga konsistensi baiknya kinerja pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
7. Mengadakan pra persiapan penyusunan LPPD dan SPM pada tahun n-1 agar OPD dapat menyiapkan data-data yang dibutuhkan sebelum penyusunan dan melakukan desk terhadap data-data tersebut supaya pada saat penyusunan telah diperoleh data yang matang;
8. Mereviu peraturan lokal yang ada mengenai pelaksanaan PATEN di Kecamatan;
9. Perlunya koordinasi lanjutan setelah rakor agar hasil rakor dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
10. Perlu OPD yang membidangi untuk hadir pada saat rakor sesuai dengan tupoksinya;
11. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan giat fisik penegasan batas wilayah;
12. Optimalisasi kerja sama antar daerah melalui APKASI Korwil jatim sehingga dapat lebih mempererat saling keterhubungan dan keterikatan antar kabupaten di Jawa Timur.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Jember, 10 Februari 2025

Kepala Bagian Tata Pemerintahan



Ervan Setiawan, S.STP, MM.

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003

RENCANA STRATEGIS BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi guna Mewujudkan Pemerintahan yang Berdaya dan Akuntabel	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan 2. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun Persentase administrasi keuangan yang dikelola			100%	100%	100%	100%	1. Memfasilitasi penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan yang Mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Guna Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Menyediakan Kebutuhan Kajian Dalam Rangka Pembangunan Jember 2. Meningkatkan Kualitas Administrasi pemerintahan Dan Kebutuhan Kerjasama Daerah yang Disertai dengan Penguatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

LAMPIRAN 1

								Daerah	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan (Pelaksanaan Bimtek)	
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	100%	100%	100%				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
5	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

LAMPIRAN 1

	han							
6	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
7	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

LAMPIRAN 1

	8	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
		Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	96,1 %	96,6 %	97,3 5%	97,8 %	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SUDARMAN NO. 01 ☎ (0331) 485162 JEMBER 68118

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan an daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	Rp. 26.945.900
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan an daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	Rp. 1.700.076.968
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan an daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp. 10.758.070

Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang dikelola	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dikelola	100%	Rp. 378.170.275
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	Rp. 159.051.937
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	Rp. 23.100.000
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%	Rp. 162.443.490
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan,	Persentase administrasi Tata pemerintahan	96,60%	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fungsi pemerintahan dan	98,73%	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	96,60%	Rp. 2.542.846.960

Kewilayahan dan Otonomi Daerah	yang terfasilitasi			kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi					
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fungsi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	98,73%	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang difasilitasi	100%	Rp. 682.606.400

Jember, 17 Januari 2024
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.
NIP. 19841025 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

JL. Sudarman No. 1 ☎ (0331) 485162 JEMBER 68118

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	Tw 1: 10%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tw 1: -	
		Tw 2: 50%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Tw 2: 3 Dokumen	
		Tw 3: 20%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Tw 3: 1 Dokumen	
		Tw 4: 20%		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Tw 4: 2 Dokumen	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang dikelola	Tw 1: 25%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Tw 1: 3 Dokumen	
		Tw 2: 25%					Tw 2: 3 Dokumen	
		Tw 3: 25%					Tw 3: 3 Dokumen	
		Tw 4: 25%					Tw 4: 3 Dokumen	
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Tw 1: 30%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Tw 1: 1 Dokumen	
		Tw 2: 40%		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tw 2: 1 Dokumen	
		Tw 3: 30%	Tw 3: 1 Laporan					
		Tw 4: -%	Tw 4: -					
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang dikelola	Tw 1: 25%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tw 1: 2 Paket	
		Tw 2: 25%		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Tw 2: 3 Paket	
		Tw 3: 25%		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tw 3: 1 Laporan	
		Tw 4: 25%					Tw 4: 1 Laporan	

Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Tw 1: 0%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Tw 1: -
		Tw 2: 75%					Tw 2: 2 Paket
		Tw 3: 15%					Tw 3: 2 Unit
		Tw 4: 10%					Tw 4: 2 Unit
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Tw 1: 30%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tw 1: 2 Unit
		Tw 2: 30%					Tw 2: 2 Unit
		Tw 3: 30%					Tw 3: 2 Unit
		Tw 4: 10%					Tw 4: 1 Unit
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	Tw 1: 100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	Tw 1: 1 Dokumen
		Tw 2: -%					Tw 2: -
		Tw 3: -%					Tw 3: -
		Tw 4: -%					Tw 4: -
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	Tw 1: 30%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Tw 1: 2 Dokumen
		Tw 2: 30%		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Tw 2: 2 Dokumen
		Tw 3: 40%		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Tw 3: 3 Dokumen
		Tw 4: -%					Tw 4: -
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	Tw 1: 25%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Tw 1: 15 Dokumen
		Tw 2: 25%					Tw 2: 15 Dokumen
		Tw 3: 25%					Tw 3: 15 Dokumen
		Tw 4: 25%					Tw 4: 15 Dokumen

Jember, 29 Januari 2024
Kepala Bagian Tata Pemerintahan,



ERVAN SETIAWAN. SSTP. MM.
NIP. 19841025 200312 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HADI SASMITO, S.H., M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER,**

HADI SASMITO, S.H., M.Si
NIP. 196804071998031009

Jember, 26 Januari 2024
Pihak Pertama
**KEPALA BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN,**



ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.
NIP. 198410252003121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100 %
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100 %
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%
4.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100 %
5.	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100 %
6.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %
7.	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen LPPD dan SPM yang Tersusun	100%
8.	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	96,60%
9.	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%
10.	Penghargaan camat terbaik dari Provinsi Jawa Timur	Diperolehnya Penghargaan camat terbaik dari Provinsi Jawa Timur	5 Besar Provinsi

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 26.945.900	P-APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.700.076.968	P-APBD
3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 10.758.070	P-APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 378.170.275	P-APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 159.051.937	P-APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 23.100.000	P-APBD
7. Penataan Organisasi	Rp. 162.443.490	P-APBD
8. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.542.846.960	P-APBD
9. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 682.606.400	P-APBD
Jumlah	Rp. 5.686.000.000,-	

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER,



[Handwritten Signature]

HADI SASMITO, S.H., M.Si
NIP. 196804071998031009

Jember, 26 Januari 2024
Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN,

[Handwritten Signature]

ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.
NIP. 19841025 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ 485162 JEMBER 68118

KEPUTUSAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 13.3 /1.11/2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER 2024

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026, maka perlu menyesuaikan indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja pendukung Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam mendukung tercapainya kinerja utama Bagian Tata Pemerintahan

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan

KELIMA : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Bagian Tata Pemerintahan
- b. Perencanaan Tahunan Bagian Tata Pemerintahan
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan

KEENAM : Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 04 Januari 2024

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KABUPATEN JEMBER**



ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003

Lampiran :

No : **065/ 6.1 /1.11/2024**

Tanggal : 04 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Bagian Tata Pemerintahan
- Tujuan : Tersedianya Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)
- Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan Kerja sama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintah dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; dan
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan}}{\text{Jumlah OPD pengampu urusan LPPD}} \times 100\%$	Data LPPD Bagian Tata Pemerintahan	KPA Kepala Bagian Tata Pemerintahan PPTK
		<p>a. Tersedianya Dokumen LPPD</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan - Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 - Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se-Kabupaten Jember yang perlu dikoordinasikan terkait validitas data - Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD buka data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan - Pemingkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat - Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan sesuai ketentuan}} \times 100\%$	Data Capaian Administrasi Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/Kelurahan - Rapat Rakor Camat - Laporan PATEN Kecamatan - Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim - Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/ Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan (PP 94 Tahun 2021) - Camat yang menempati rumah dinas di wilayah kerjanya - Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya - Jumlah kasus pelanggaran disiplin kerja yang terjadi (semakin menunjukkan disiplin 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<p>kerja dapat berjalan) dan tingkat disiplin kerja meningkat</p> <p>2. Rapat Rakor Camat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Rapat Koordinasi Camat dalam rangka menindaklanjuti keadaan dinamis yang berkembang di lapangan, sosialisasi kebijakan pemerintahan di wilayah kecamatan <p>3. Laporan PATEN Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kecamatan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan , waktu layanan fleaksible) - Kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan PATEN - Dukungan lintas OPD dalam koherensi dan sinkronisasi pelayanan terpadu di kecamatan <p>4. Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Upacara HUT Jember dan HUT Jatim <p>5. Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rupabumi/Toponimi yang masuk dalam aplikasi SINAR BIG (Badan Informasi Geospasial) 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindak lanjuti	<p>Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang Ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan}} \times 100\%$	Data Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah - Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI - Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO - Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah. <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah <ul style="list-style-type: none"> - Tata laksana kerjasama daerah sesuai dengan aturan yang masih berlaku (Permendagri 22 tahun 2020) - Kerjasama sama dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik antar daerah dan pihak ketiga - Kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu menyepakati nota kesepahaman (MOU) yang secara teknis akan diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat hal substantive 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan RAKERWIL APKASI 3. Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dalam kegiatan APKASI OTONOMI EXPO 4. Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah. <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya rapat dengan TKKSD 		

II. INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG KINERJA UTAMA)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan/pedoman}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi yang seharusnya disusun (15 Dokumen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - RANWAL RENJA N+1 - RENJA PERUBAHAN - RANKHIR RENJA - RANKHIR RENJA N+1 - RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) - RENCANA AKSI (RENAKSI) - PERJANJIAN KERJA (PK) - RKA - LAPORAN HASIL PENYUSUNAN RKA - RKPA - LAPORAN HASIL PENYUSUNAN RKPA - DPA - LAPORAN HASIL PENYUSUNAN DPA - DPPA - LAPORAN HASIL PENYUSUNAN DPPA <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p>		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kualitas penyusunan sesuai pedoman; - Tersusun tepat waktu 		
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	<p>Jumlah Administrasi Keuangan yang Terlaksana sesuai pedoman</p> $\frac{\text{Jumlah Administrasi Keuangan yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Administrasi Keuangan yang direncanakan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi keuangan yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan (6 item):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja peralatan dan perlengkapan kantor - Belanja Natura dan Pakan Natura - Belanja Perabot Kantor - Belanja Mamin aktivitas lapangan - Belanja tagihan air <p>Dokumen-dokumen tersebut disajikan dalam Rekapitulasi bulanan</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terangarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun}}{\text{Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: a. Jumlah administrasi barang yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan: - Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan - Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah b. Tersusun sesuai ketentuan: - Terangankan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangankan sesuai ketentuan Pedum APBD		
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terlaksana sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Administrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: a. Jumlah administrasi umum yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan : - Honorarium Pengelola Keuangan		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Pejabat PBJ - Honorarium tenaga administrasi - Honorarium tenaga kebersihan - Pembayaran internet - Penyediaan pakaian kedinasan (pakaian olah raga, pakai adat) - Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan - Laporan Kunjungan Kerja - Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terangkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Pengadaan barang di Bagian Tata Pemerintahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang hasil pengadaan - Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang 		

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		b. Tersusun sesuai ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Terangungkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangungkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa di Bagian Tata Pemerintahan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat - Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor b. Tersusun sesuai ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Terangungkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangungkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dan Siap Pakai}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Penjelasan: a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - pemeliharaan rutin/ service berkala dan - perbaikan atas kerusakan/ - penggantian spare part b. Barang Milik Daerah yang dipelihara meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Alat kantor dan rumah tangga - Komputer 		